

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Semakin pesatnya perkembangan pasar modal saat ini khususnya di Indonesia maka perusahaan dituntut untuk memperbaiki diri dalam perusahaan tersebut agar dapat bersaing dan dapat memperoleh dana dari para investor. Dengan adanya tuntutan seperti ini maka perusahaan harus dituntut agar lebih transparan dalam mengungkapkan informasi yang ada di perusahaan tersebut. Pengungkapan informasi tersebut dituangkan dalam pengungkapan sukarela yang meliputi informasi-informasi yang secara sukarela diungkapkan oleh perusahaan melalui laporan tahunan guna memperoleh citra yang baik di mata para pengguna laporan keuangan.

Laporan tahunan bertujuan memberikan informasi dari semua aktifitas perusahaan dan sebagai alat pertanggungjawaban kepada pihak internal maupun pihak eksternal atau ditunjukkan kepada semua pihak yang berkepentingan atau *stakeholders*. Laporan tahunan dalam suatu perusahaan tidak hanya menyampaikan informasi mengenai keuangan kepada *stakeholders*, tetapi juga sebagai media penyalpnaan informasi mengenai tata kelola dan tanggung

Pada laporan tahunan perusahaan terdapat beberapa pengungkapan yakni pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*), dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Dalam PSAK No. 1 (revisi 1998) paragraf 9 tentang Penyajian Laporan Keuangan dinyatakan bahwa:

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”.

Secara umum, tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda (Suwardjono, 2013). Hal itu dapat membantu para investor untuk pengambilan keputusan.

Suwardjono (2013), menyatakan bahwa *voluntary disclosure* adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan selain dari apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Voluntary disclosure* ini merupakan cara perusahaan untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan untuk membantu investor dalam memahami strategi bisnis manajemen.

Voluntary disclosure dilakukan oleh perusahaan selain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pengguna informasi juga bertujuan untuk memberikan

manfaat bagi perusahaan itu sendiri yaitu dapat berupa alat untuk menghadapi persaingan antar perusahaan di sektor pasar modal dalam saham atau sekuritas yang ditawarkan. Hal tersebut menjadikan manajemen perusahaan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan pengungkapan sukarela terlebih dahulu mempertimbangkan manfaat dan biaya yang terkait dengan pengungkapan sukarela (Nabor dan Suardana, 2014).

Berdasarkan teori keagenan, antara pemilik perusahaan dan para manajer memiliki kepentingan yang berbeda-beda dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan. Perbedaan kepentingan tersebut dapat memicu terjadinya konflik keagenan atau biasa disebut dengan asimetri informasi yang dapat disebabkan oleh adanya kesenjangan kepentingan antara pihak pemilik dan manajer atas informasi yang mereka miliki mengenai kondisi perusahaan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa asimetri informasi antara pemilik perusahaan dan pihak manajer dapat terjadi karena pihak manajer dapat berinteraksi secara langsung dengan kegiatan operasional perusahaan sehingga pihak manajer mengetahui secara mendalam segala informasi menyangkut kondisi perusahaan (Baskaraningrum dan Merkusiwati, 2013).

Asimetri informasi dapat dikendalikan dengan adanya tata kelola mekanisme *corporate governance* yang baik dimana tata kelola tersebut dapat menjadikan faktor keberhasilan sebuah perusahaan. Adanya mekanisme *corporate governance* yang baik menjadi terhadap tanggung perusahaan dan diungkapkan dalam laporan tahunan (*annual report*) diharapkan dapat

manfaat bagi perusahaan itu sendiri yaitu dapat berupa alat untuk menghadapi persaingan antar perusahaan di sektor pasar modal dalam saham atau sekuritas yang ditawarkan. Hal tersebut menjadikan manajemen perusahaan sebelum mengambil keputusan anak melakukan pengungkapan sukrela terlebih dahulu mempertimbangkan manfaat dan biaya yang terkait dengan pengungkapan sukrela (Nabor dan Suardana, 2014).

Berdasarkan teori keagenan, antara pemilik perusahaan dan para manajer memiliki kepentingan yang berbeda-beda dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan. Perbedaan kepentingan tersebut dapat memicu terjadinya konflik keagenan atau bias disebut dengan asimetri informasi yang dapat disebabkan oleh adanya kesempatan antara pihak pemilik dan manajer atas informasi yang mereka miliki mengenai kondisi perusahaan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa asimetri informasi antara pemilik perusahaan dan pihak manajer dapat terjadi karena pihak manajer dapat berinteraksi secara langsung dengan kegiatan operasional perusahaan sehingga pihak manajer mengetahui secara mendalam segala informasi mengenai kondisi perusahaan (Baskaralingam dan Mekaswati, 2013).

Asimetri informasi dapat dikehadirkan dengan adanya tata kelola mekanisme corporate governance yang baik dimana tata kelola tersebut dapat menjadikan faktor keberhasilan sebuah perusahaan. Adanya mekanisme corporate governance yang baik menjadi terdapat tanggung perusahaan dan diungkapkan dalam laporan tahunan (annual report) diharapkan dapat

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik perusahaan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Perusahaan mempunyai kewajiban dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kesetaraan, dan kewajaran yang menjadi prinsip penting dalam pengelolaan kinerja suatu perusahaan. Dengan terlaksananya mekanisme *corporate governance* di dalam perusahaan akan dapat meningkatkan transparansi perusahaan sehingga kepentingan pemilik maupun manajer dapat diketahui satu sama lain dan juga dapat memberikan nilai kepercayaan yang lebih dari para pengguna laporan keuangan seperti *stakeholders*, investor, pemerintah, dan masyarakat.

Mekanisme *corporate governance* seperti kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Kepemilikan manajerial merupakan persentase total saham (kepemilikan saham) yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan, baik dewan direksi maupun manajer perusahaan yang memiliki wewenang dan keikutsertaan dalam pengambilan keputusan (Utami dan Prastiti, 2011). Kepemilikan manajerial dapat menyelaraskan kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan dikarenakan pihak manajemen merasa ikut memiliki perusahaan tersebut sehingga dapat mengurangi terjadinya konflik keagenan (Baskaraningrum dan Merkusiwati, 2013). Dengan adanya kepemilikan manajerial maka pihak manajemen akan berusaha meningkatkan kinerjanya sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengungkapkan

informasi tambahan yang dipandang relevan dalam upaya pengambilan keputusan oleh para pemakai informasi keuangan (Utami dan Prastiti, 2011).

Jumlah rapat komite audit dalam suatu perusahaan lebih memungkinkan pencapaian peran pemantauan yang lebih efektif karena perusahaan akan lebih terkontrol dalam kinerja keuangannya. Jumlah rapat komite audit akan memungkinkan para anggota untuk mengekspresikan penilaian tentang pemilihan prinsip akuntansi di perusahaan, yaitu mengenai pengungkapan dan estimasinya (Allegrini dan Greco, 2011). Secara empiris, penelitian Allegrini dan Greco (2011) dan Madi *et al.*, (2014) telah menemukan bahwa setidaknya empat pertemuan setahun bagi anggota komite audit secara signifikan terkait dengan tingkat pengungkapan sukarela dan pengungkapan modal intelektual.

Penelitian terdahulu terkait dengan faktor yang mempengaruhi *voluntary disclosure* adalah *proprietary cost*. Pertimbangan biaya seperti halnya *proprietary cost* menjadi perhatian perusahaan dalam melakukan pengungkapan sukarela, selain itu struktur kepemilikan merupakan faktor lain yang dapat memotivasi manajemen perusahaan untuk melakukan pengungkapan sukarela (Priyanto dan Widianingsih, 2012).

Salah satu hal yang dapat mengurangi bentuk interferensi dari manajemen yang memiliki saham perusahaan yang dapat mempengaruhi independensinya adalah independensi komite audit. Independensi komite audit dapat mengurangi bentuk interferensi dari manajemen yang memiliki saham perusahaan yang dapat mempengaruhi independensinya sedangkan keahlian

komite audit dapat memberikan kontribusi pada efektivitas komite audit dalam melakukan pengawasan pengungkapan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan tahunan perusahaan untuk pengambilan keputusan bisnis (Aini, 2015). Menurut penelitian Akhtaruddin dan Haron (2010), variabel independensi komite audit terbukti dapat memperlemah hubungan kepemilikan dewan dengan pengungkapan sukarela.

Berdasarkan penelitian terdahulu dan mengembangkan model penelitian Nabor dan Suardana (2014), maka penelitian ini mencoba mengkonfirmasi kembali permasalahan yang ada dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Struktur Kepemilikan, Jumlah Rapat Komite Audit, dan *Proprietary Cost* Terhadap *Voluntary Disclosure* dengan Independensi Komite Audit Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2014)”**. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini menambahkan satu variabel independen yaitu jumlah rapat komite audit dan satu variabel moderasi yaitu independensi komite audit.

Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi praktik *voluntary disclosure* pada perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia. Selain itu di dalam penelitian ini dapat mengetahui faktor yang dapat memoderasi hubungan kepemilikan manajerial dengan *voluntary disclosure*. Maka dari itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para praktisi dalam memahami

pengungkapan sukarela dalam perusahaan maupun untuk pengambilan keputusan. Serta dapat memberikan pengetahuan lebih luas mengenai pengungkapan sukarela bagi para akademisi.

B. Batasan Masalah Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, jumlah rapat komite audit, *proprietary cost*, dan independensi komite audit.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut maka didapat permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *voluntary disclosure*?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *voluntary disclosure*?
3. Apakah jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap *voluntary disclosure*?
4. Apakah *proprietary cost* berpengaruh positif terhadap *voluntary disclosure*?
5. Apakah independensi komite audit mampu memoderasi hubungan kepemilikan manajerial dengan *voluntary disclosure*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh struktur kepemilikan, jumlah rapat komite audit, dan *proprietary cost* terhadap *voluntary disclosure*. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji secara empiris pengaruh positif kepemilikan manajerial terhadap *voluntary disclosure*.
2. Menguji secara empiris pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap *voluntary disclosure*.
3. Menguji secara empiris pengaruh positif jumlah rapat komite audit terhadap *voluntary disclosure*.
4. Menguji secara empiris pengaruh positif *proprietary cost* terhadap *voluntary disclosure*.
5. Menguji secara empiris moderasi independensi komite audit terhadap hubungan kepemilikan manajerial dengan *voluntary disclosure*.

E. Manfaat Penelitian

1. Bidang Teoritis
 - a. Untuk menambah literatur dalam bidang akuntansi dan dapat dijadikan referensi pada penelitian yang selanjutnya.
 - b. Memberikan pemahaman dan penjelasan lebih mendalam mengenai

2. Bidang Praktisi

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman lebih tentang pentingnya pengungkapan sukarela dalam laporan keuangan.
- b. Bagi *shareholders* dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan yang terkait dengan pelaporan dengan luas